

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN STUNTING OLEH DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN DI KECAMATAN KIE

Adriana Rodina Fallo

Prodi Ilmu Administrasi, FISIP, Universitas Nusa Cendana Kupang

Koresponden: rodinafallo3@gmail.com

ABSTRAK

Dari 22 kabupaten/kota di Propinsi NTT, Kabupaten Timor Tengah Selatan menjadi kabupaten dengan kasus stunting terbesar dengan persentase 44,1% pada february 2020. Untuk mengatasi permasalahan stunting di Kabupaten TTS khususnya di Kecamatan Ki maka Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Selatan diberikan wewenang untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana salah satunya adalah pencegahan stunting dengan program keluarga berencana (KB). Meskipun telah dilakukan sosialisasi tentang dampak stunting yang massif namun hal ini masih angka stunting di Kecamatan Kie masih tinggi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Kie dengan informan berjumlah 47 orang. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui sumber primer dan sumber sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan penelusuran dokumen-dokumen terkait permasalahan program keluarga berencana (KB) serta permasalahan stunting di Kecamatan Kie. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis dari Creswell (2016:264-268). Kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan pencegahan stunting oleh Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Selatan di Kecamatan Kie masih ditemui beberapa permasalahan dalam implementasinya sehingga kebijakan ini belum dapat dinyatakan berhasil.

Kata Kunci: Stunting, Implementasi, Keluarga Berencana

PENDAHULUAN

Stunting merupakan bentuk kegagalan tumbuh kembang yang menyebabkan gangguan pertumbuhan linear pada balita akibat dari akumulasi ketidakcukupan nutrisi

yang berlangsung lama, mulai dari masa kehamilan sampai usia 24 bulan. Kekurangan gizi pada masa tumbuh kembang anak di usia dini akan menghambat perkembangan fisik, meningkatnya kesakitan, menghambat perkembangan mental anak, dan bahkan menyebabkan kematian. Balita yang mengalami masalah gizi stunting memiliki risiko terjadinya penurunan kemampuan intelektual, produktivitas, dan kemungkinan risiko mengalami penyakit degeneratif di masa mendatang (Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan, 2018).

Merujuk pada data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dinyatakan bahwa prevalensi balita mengalami stunting di Indonesia pada tahun 2019 cenderung menurun dibandingkan 2018, yaitu dari 30,8 persen menjadi 27,7 persen namun angka ini tetapi tinggi. Untuk diketahui bahwa pada tahun 2007, angka stunting di Indonesia mencapai 36,8%, pada 2010 mencapai 34,6%, 2013 mencapai 37,2% dan pada tahun 2018 berjumlah 30,8%. Sebagai perbandingan di Amerika pada tahun 2010 angka stunting hanya mencapai 2,1%, untuk Jepang menjadi 7,1% pada tahun 2014 sedangkan Malaysia, Thailand dan Singapura masing-masing 17%, 16%, 4% (kemkes.go.id, 2020).

Meskipun menurun, tetapi faktanya angka persentase stunting di Indonesia masih. Saat ini, angka stunting Indonesia berada di urutan ke-4 dunia. Prevalensi balita stunting di Indonesia pada 2019 yakni 27,7 persen. Jumlah yang masih jauh dari nilai standard WHO yang seharusnya dibawah 20 persen. Diketahui, saat ini alokasi anggaran untuk penanganan kesehatan tahun 2020 sebesar Rp 132,2 Triliun, naik dari alokasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp 123,1 Triliun. Namun anggaran tersebut tidak hanya dikelola oleh Kemenkes tapi juga K/L bidang kesehatan lainnya termasuk transfer ke daerah salah satunya adalah propinsi NTT.

Data Dinas Kesehatan Propinsi NTT menyatakan bahwa angka prevalensi balita stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam tiga tahun terus mengalami penurunan. Meski demikian, angkanya masih tinggi yaitu sebesar 27,5 persen dengan kasus meninggal sebanyak 57 orang. Data jumlah stunting pada tahun

2018 sebesar 30,1% lalu di tahun 2019 menurun menjadi 27,9%. Sementara hingga periode Agustus 2020 ini sebesar 27,5 persen (Dinas Kesehatan Propinsi NTT, 2020).

Dari 22 kabupaten/kota di Propinsi NTT, Kabupaten Timor Tengah Selatan menjadi kabupaten dengan kasus stunting terbesar dengan persentase 44,1% pada februari 2020. Target pemerintah Propinsi NTT adalah menurunkan prevalensi balita stunting ini sampai di bawah 15 sampai 10 persen dengan menekan jumlah balita stunting, wasting atau kekurangan gizi, dan *underweight*.

Untuk mengatasi permasalahan stunting di Kabupaten TTS dengan berpedoman kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga maka Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Selatan diberikan wewenang untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana salah satunya adalah pencegahan stunting dengan program keluarga berencana (KB)

Namun program keluarga berencana (KB) oleh Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Selatan sedang menggambarkan bahwa di balik program tersebut ternyata menyimpan masalah serius yang juga terus membengkak yaitu masih tingginya angka persentase stunting di Kabupaten TTS. Dalam Implementasinya, meskipun telah dilakukan sosialisasi tentang dampak stunting yang massif namun hal ini masih belum efektif. Salah satu Kecamatan di Kabupaten TTS dengan kasus stunting tertinggi adalah Kecamatan Kie

Masyarakat Kecamatan Kie beranggapan bahwa stunting bukan masalah krusial yang harus ditangani melainkan stunting terjadi karena faktor keturunan atau genetik. Anggapan tersebut didukung oleh faktor langsung perilaku masyarakat yang cenderung menikah di usia muda dengan pekerjaan yang belum mapan dan kondisi mental yang belum siap untuk menjadi seorang ibu terakumulasi dengan pengetahuan tentang tumbuh kembang bayi yang masih minim sehingga ASI eksklusif diganti dengan pemberian makanan pada awal kelahiran seperti pemberian pisang, madu, gula, dan lainnya serta pemberian makanan tambahan yang tidak merata. Permasalahan lainnya

terlihat dari kebiasaan penduduk di Kecamatan Kie, terutama dalam aktivitasnya di bidang pertanian atau perkebunan, seringkali mengharuskan orang tua meninggalkan anaknya di rumah. Meskipun anak mereka masih termasuk baduta yang memerlukan pemberian ASI, namun tanggungan pekerjaan tidak bisa ditinggalkan. Hal ini menyebabkan kurangnya asupan ASI untuk anak-anak dari Kecamatan Kie yang bisa berdampak langsung terhadap permasalahan stunting.

Dalam konteks implementasi kebijakan, Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai salah satu lembaga yang diberikan tanggung jawab terkait program keluarga berencana (KB) untuk pencegahan stunting di Kecamatan Kie dituntut tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan yang standar namun pelayanan kesehatan yang prima dengan mengedepankan kualitas dibutuhkan untuk memberikan hasil yang lebih baik yaitu penurunan angka persentase stunting di Kecamatan Kie.

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas dapat dinyatakan bahwa efektivitas suatu kebijakan tidak dapat tercapai apabila setelah pelaksanaan kegiatan kebijakan publik ternyata dampaknya tidak mampu memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan kebijakan tersebut telah gagal, tetapi adakalanya suatu kebijakan publik hasilnya tidak langsung efektif dalam jangka pendek, akan tetapi setelah melalui proses tertentu sehingga untuk mengetahui apakah implementasi program keluarga berencana (KB) telah efektif dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Selatan di Kecamatan Kie maka diperlukan kajian dan analisis mendalam mengenai kesesuaian antara pelaksanaan program keluarga berencana (KB) dengan tujuan kebijakan yaitu menurunnya persentase stunting di Kecamatan Kie.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Secara etimologis, istilah *policy* (kebijakan) berasal dari bahasa Yunani, Sanskerta, dan Latin. Akar kata dalam bahasa Yunani dan Sanskerta *polis* (negara-

kota) dan *pur* (kota) dikembangkan dalam bahasa Latin menjadi *politia* (negara) dan akhirnya dalam bahasa Inggris pertengahan *policie*, yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. Asal usul etimologis kata *policy* sama dengan kata penting lainnya: *police* dan *politics* (Dunn, 2003:51).

Kebijakan dan kebijaksanaan negara sering disebut juga dengan kebijakan publik, kebijakan Negara atau kebijaksanaan pemerintah sebenarnya memiliki arti yang sama. Friedrich 1969 dalam Agustino (2016:16) menyatakan bahwa: Kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, pemerintah atau suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dari kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Pengertian kebijakan lainnya dikemukakan oleh Nugroho (2006:23) membuat rumusan pemahaman tentang kebijakan publik. Pertama, kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh administrator negara atau administrator publik. Jadi, kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh pemerintah. Kedua. Kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik bukan kehidupan seorang atau perorang. Kebijakan publik mengatur semua yang ada di domain lembaga administrator publik. Kebijakan publik mengatur masalah bersama atau masalah pribadi atau golongan yang sudah menjadi masalah dari seluruh masyarakat di daerah itu. Ketiga, dikatakan sebagai kebijakan publik jika manfaat yang diperoleh masyarakat yang bukan pengguna langsung dari produk yang dihasilkan jauh lebih banyak atau lebih besar dari pengguna langsungnya.

Model Implementasi Kebijakan Publik Edward III

Dalam mengkaji implementasi kebijakan Edward III (1980:21) mengungkapkan 4 faktor atau variabel krusial dalam implementasi kebijakan publik. Factor-faktor tersebut adalah:

1. Komunikasi
Implementasi yang efektif terjadi apabila pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Hal itu dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik. Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.
2. Sumber Daya
Bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan dan atura-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan yang kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.
3. Disposisi
Jika suatu pelaksanaan kebijakan ingin efektif maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya sehingga dalam prakteknya tidak terjadi bias.
4. Struktur Birokrasi
Kebijakan yang begitu kompleks menuntut kerja sama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia maka hal ini akan menjadikan sumber daya tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan.

Stunting

Stunting adalah masalah gizi kronis pada balita yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya. Anak yang menderita stunting akan lebih rentan terhadap penyakit dan ketika dewasa berisiko untuk mengidap penyakit degeneratif. Dampak stunting tidak hanya pada segi kesehatan tetapi juga mempengaruhi tingkat kecerdasan anak. Kejadian balita pendek atau biasa disebut dengan stunting merupakan salah satu masalah gizi yang dialami oleh balita di dunia saat ini. Pada tahun 2017 22,2% atau sekitar 150,8 juta balita di dunia mengalami

stunting. Namun angka ini sudah mengalami penurunan jika dibandingkan dengan angka stunting pada tahun 2000 yaitu 32,6%. (buletin stunting.kemkes.go.id, 2018).

Definisi lain menyebutkan bahwa pendek dan sangat pendek adalah status gizi yang didasarkan pada indeks panjang badan menurut umur (PB/U) atau tinggi badan menurut umur (TB/U) yang merupakan padanan istilah *stunted* (pendek) dan *severely stunted* (sangat pendek). Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1995/MENKES/SK/XII/2010 tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak, pengertian pendek dan sangat pendek adalah status gizi yang didasarkan pada indeks Panjang badan menurut umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut umur (TB/U) yang merupakan padanan istilah *Stunted* (pendek) dan *severely stunted* (sangat pendek).

Kategori besaran prevalensi kejadian stunting yang telah ditetapkan oleh WHO 1995 dikategorikan menjadi 4 bagian yaitu low, medium, high dan very high prevalence. Berikut ini adalah kategori persen prevalensi kejadian stunting (World Health Organization, 2010):

- <20% Low prevalence
- 20-29% Medium prevalence
- 30-39% High prevalence
- >40% very high prevalence

Dari kategori prevalensi kejadian stunting berdasarkan standar World Health Organization maka Propinsi NTT berada pada very high *prevelance stunting* dengan jumlah kasus stunting mencapai 43,82%, sedangkan dari 22 kabupaten/kota di Propinsi NTT, Kabupaten TTS menjadi kabupaten dengan kasus stunting tertinggi (*very high prevelance*) yaitu pada angka 44,1%.

Dampak stunting

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyatakan bahwa terdapat dampak yang ditimbulkan dari stunting (buletin stunting.kemkes.go.id, 2018). Dampak yang

ditimbulkan stunting dapat dibagi menjadi dampak jangka pendek dan jangka panjang sebagai berikut:

1. Dampak Jangka Pendek.
 - a. Peningkatan kejadian kesakitan dan kematian;
 - b. Perkembangan kognitif, motorik, dan verbal pada anak tidak optimal;
 - c. Peningkatan biaya kesehatan.
2. Dampak Jangka Panjang.
 - a. Postur tubuh yang tidak optimal saat dewasa (lebih pendek dibandingkan pada umumnya);
 - b. Meningkatnya risiko obesitas dan penyakit lainnya;
 - c. Menurunnya kesehatan reproduksi;
 - d. Kapasitas belajar dan performa yang kurang optimal saat masa sekolah;
 - e. Produktivitas dan kapasitas kerja yang tidak optimal.

Peran Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Pencegahan Stunting

Stunting menjadi ancaman cukup serius bagi anak-anak Indonesia, khususnya di Kecamatan Kie Kabupaten TTS. Salah satu penyebab masalah tumbuh kembang ini karena peran orang tua dan keluarga yang kurang maksimal. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Selatan memiliki peran krusial dalam memberikan edukasi terhadap orang tua.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (disingkat BKKBN, ditulis bkkbn, sebelumnya ditulis Bkkbn) adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Kesehatan. BKKBN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Dalam melaksanakan tugas, BKKBN menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan nasional di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
2. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
3. Pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
4. Penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
5. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
6. Pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebuah alternatif solusi untuk menata secara umum kewenangan antar pemerintah agar dapat melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dengan lebih efektif. Saat ini BKKBN diberikan kewenangan untuk mengelola tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB sedangkan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota diberikan kewenangan untuk mendayagunakan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Tujuan dari penelitian ini pada hakekatnya adalah berupaya untuk mengetahui dan menganalisis tentang implementasi kebijakan pencegahan stunting oleh Bkkbn Kabupaten Timor Tengah Selatan Di Kecamatan Kie. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan

secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nasir, 2005:54).

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi peran serta (*participan observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi terkait dengan fokus permasalahan penelitian yang telah ditetapkan oleh penulis.

Didalam melakukan pengumpulan data, peneliti akan menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari beberapa teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada, dalam hal ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak (Sugiyono, 2012:241). Nilai dari teknik pengumpulan data dengan triangulasi adalah untuk mengetahui data yang diperoleh *convergent* (meluas), tidak konsisten atau kontradiksi. Oleh karena itu, dengan triangulasi diharapkan hasil yang diperoleh bisa lebih konsisten, tuntas dan pasti.

Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, data yang diperoleh peneliti menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Creswell (2016). Salah satu alasan penulis untuk menggunakan metode analisis data Creswell dikarenakan teknik analisis data ini dapat memberikan gambaran dan eksplorasi data yang tepat dan relevan dengan data yang dikumpulkan. Teknik analisis data Creswell dirasa lebih mendetail dan terstruktur dengan baik dalam menyusun tahapan data sehingga dapat membentuk bahasan yang sangat komprehensif dan mendalam, selain itu terdapat tahap visualisasi yang mempresentasikan data. Dalam teknik analisis data spiral ini terdapat tahap deskripsi data, klarifikasi dan interpretasi data yang dapat menyusun pembahasan yang

menyeluruh. Karena penjelasan yang disajikan dari tahap ke tahap dalam metode ini dijelaskan secara konkrit dan jelas apa yang harus dilakukan oleh penulis, tentunya hal ini menjadi alasan penulis untuk menggunakan teknik analisis yang dipaparkan oleh Creswell.

Adapun penjelasan dari setiap langkah-langkah analisis data yang diajukan oleh Creswell (2016:264-268) terkait terminologi yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Peneliti memulai mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara, men-*scanning* materi, mengetik data lapangan atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda bergantung pada sumber informasi
2. Langkah kedua adalah membaca data secara keseluruhan. Langkah pertama adalah membangun *general sense* atau informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan. Pada tahap ini terkadang peneliti menulis catatan-catatan kecil dan membuat memo (catatan kecil) mengenai data yang dianggap penting
3. Langkah selanjutnya adalah memulai *coding* semua data. *Coding* merupakan proses mengorganisasikan data dengan mengumpulkan potongan (teks atau gambar) dan menuliskan kategori dalam batas-batas. Kode-kode tersebut dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu:
 - a. Kode-kode yang berkaitan dengan topik utama yang sudah banyak diketahui oleh pembaca secara umum, dengan berpijak pada literatur sebelumnya dan *common sense*.
 - b. Kode-kode yang mengejutkan dan tidak disangka-sangka di awal penelitian.
 - c. Kode-kode yang ganjil dan memiliki ketertarikan konseptual bagi pembaca.
4. Selanjutnya, terapkan proses *coding* untuk mendeskripsikan *setting* (ranah), orang (partisipan), kategori dan tema yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang, lokasi atau peristiwa

5. Langkah ke lima adalah peneliti mendeskripsikan tema-tema tersebut di atas dan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif. Pendekatan ini meliputi tentang kronologi peristiwa, tema (sub tema, ilustrasi khusus, perspektif dan kutipan), hubungan antar tema, visual, gambar atau tabel.
6. Langkah terakhir adalah pembuatan interpretasi (*interpretation in qualitative research*) atau memaknai data. Hal ini membantu peneliti mengungkap esensi dari suatu gagasan. Interpretasi bisa berupa makna yang menjadi perbandingan antara hasil penelitian dengan informasi yang berasal dari literatur atau teori. Dalam hal ini peneliti menegaskan apakah hasil penelitian membenarkan atau justru menyangkal informasi sebelumnya. Peneliti mendeskripsikan bagaimana hasil akhir naratif akan dibandingkan dengan teori-teori dan literatur umum.

HASIL PENELITIAN

Dalam kajian administrasi publik, konsep publik dikemukakan Frederickson (1997:30) yang melihat publik dalam lima perspektif yaitu: (a) publik sebagai kelompok kepentingan; (b) publik sebagai pemilih rasional (c) publik sebagai representasi masyarakat; (d) publik sebagai konsumen, dan (e) publik sebagai warga negara. Dalam hal ini publik dipandang sebagai individu yang memiliki multi perspektif dan independensi dalam melakukan berbagai tindakan sosial yang memiliki dampak terhadap orang lain.

Konteks kebijakan publik melihat eksistensi ruang publik sangat dipengaruhi oleh konteks *governance* yakni adanya pembagian kekuasaan antara negara, pasar, dan masyarakat secara lebih luas (Wasisto, 2016), Ruang publik (*public space*) merupakan salah satu sarana fisik yang dalam pembangunannya memerlukan sebuah kebijakan publik. Ruang publik merupakan termasuk barang publik (*public goods*) dan digunakan untuk kepentingan publik.

Namun dalam implementasinya, kebijakan tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga dalam upaya mencegah stunting belum maksimal dalam tataran implementasinya di Kecamatan Kie Kabupaten TTS. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa kategori prevalensi kejadian stunting berdasarkan standar World Health Organization maka Propinsi NTT berada pada *very high prevalence stunting* dengan jumlah kasus stunting mencapai 43,82%, sedangkan dari 22 kabupaten/kota di Propinsi NTT, Kabupaten TTS menjadi kabupaten dengan kasus stunting tertinggi (*very high prevalence*) yaitu pada angka 44,1% dan kecamatan dengan angka stunting tertinggi di Kabupaten TTS adalah Kecamatan Kie.

Stunting menjadi ancaman cukup serius bagi anak-anak Indonesia, khususnya di Kecamatan Kie Kabupaten TTS. Salah satu penyebab masalah tumbuh kembang ini karena peran orang tua dan keluarga yang kurang maksimal. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Selatan Kabupaten TTS memiliki peran krusial dalam memberikan edukasi terhadap orang tua

Berhasil atau tidaknya suatu produk kebijakan kebijakan publik pada akhirnya ditentukan pada tataran implementasinya. Secara sederhana implementasi kebijakan merupakan tindakan dalam proses pembuktian dari sebuah kebijakan. Untuk melihat tentang bagaimanakah implementasi kebijakan pencegahan stunting oleh Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Selatan di Kecamatan Kie maka penulis menggunakan model implementasi kebijakan dari Edward III (1980:21) yang mengungkapkan 4 faktor atau variabel krusial dalam implementasi kebijakan publik. Faktor-faktor tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi yang akan dibahas lebih lanjut melalui pembahasan di bawah ini:

1. Komunikasi

Komunikasi memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun baiknya sebuah kebijakan tanpa dikomunikasikan dengan baik tentunya tidak akan berhasil mencapai tujuan kebijakan. Oleh karena itu, kebijakan harus dikomunikasikan oleh pelaksana kebijakan dengan tepat serta menggunakan saluran yang tepat pula. Sejalan dengan hal tersebut maka dalam implementasi kebijakan penataan ruang di Kota Kupang, komunikasi merupakan faktor yang harus diperhatikan dalam pengimplementasian kebijakan ini.

Sejauh manakah variabel komunikasi dalam implementasi kebijakan pencegahan stunting oleh Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Selatan di Kecamatan Kie dapat dilihat dari tiga dimensi, yaitu *transmission, clarity dan consistency* (Edward III, 1980:10). Transmisi kebijakan berkaitan dengan cara penyampaian informasi kebijakan, *clarity* berkaitan dengan kejelasan kebijakan, serta *consistency* berkaitan dengan tingkat konsistensi dari kebijakan. Untuk lebih jelasnya dimensi komunikasi dalam implementasi kebijakan pencegahan stunting oleh Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Selatan di Kecamatan Kie maka akan penulis paparkan sebagai berikut:

Transmisi atau penyampaian informasi terkait kebijakan pencegahan stunting oleh Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Selatan Kecamatan Kie ini, menurut hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang dalam hal ini adalah Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Selatan sudah menyampaikan informasi tentang cara pencegahan stunting Di Kecamatan Kie. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam hal ini adalah para penyuluh di Kecamatan Kie melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik perorangan ataupun kelompok, agar masyarakat mengetahui tentang cara pencegahan stunting. Sehingga, dengan penyampaian informasi ini diharapkan masyarakat Kecamatan Kie dapat memahami dampak stunting dan cara pencegahannya. Bahkan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Selatan pun sudah menginformasikan melalui media cetak maupun non cetak terkait pencegahan stunting. Sebenarnya Kecamatan Kie ini sudah melakukan intervensi untuk menekan angka stunting. Namun harus diakui memang penurunan angka stunting belum signifikan. Kedepan perlu adanya koordinasi yang lebih baik lagi dengan pihak terkait agar percepatan penurunan angka stunting di desa-desa bisa terwujud

Clarity atau kejelasan dari kebijakan pencegahan stunting oleh Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Selatan di

Kecamatan Kie ini, menurut hasil observasi, wawancara dan dokumentasi diketahui bahwa pada dasarnya kebijakan pencegahan stunting ini sudah jelas. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (1) BKKBN bertugas melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKKBN mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan nasional; b. penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria; c. pelaksanaan advokasi dan koordinasi; d. penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi; e. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi; dan f. pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi; di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Bahkan Kabupaten TTS menginisiasi program rebuk aksi percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten TTS dilakukan langsung oleh Bupati TTS. Usai membuka kegiatan tersebut, dilakukan penandatanganan pernyataan komitmen pencegahan dan penanganan stunting oleh seluruh stakeholder terkait. Namun hingga tahun 2020 Kabupten TTS Khususnya Kecamatan Kie masih menjadi salah satu daerah di Indonesia dengan kasus stunting terbesar.

Konsistensi dalam implementasi kebijakan menurut hasil penelitian ini diketahui bahwa pada dasarnya Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Selatan telah berupaya untuk melaksanakan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Namun, masih saja terjadi permasalahan stunting dimana masyarakat beranggapan bahwa stunting bukan suatu masalah yang krusial yang perlu ditangani secara serius. Masyarakat beranggapan bahwa stunting adalah masalah keturunan atau bahkan membawa permasalahan stunting dengan hal mistis. Dengan demikian, implementasi kebijakan pencegahan stunting oleh Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Selatan di Kecamatan Kie dari sisi komunikasi telah dilakukan namun masih ditemui kendala dari sisi konsistensi informasi yang diberikan serta partisipasi masyarakat.

2. Sumber Daya

Bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan dan atura-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan yang kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Sumber daya merupakan faktor kedua setelah komunikasi yang akan turut mempengaruhi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya kebijakan merupakan segala sesuatu yang digunakan guna mendukung terhadap berhasilnya kebijakan diimplementasikan. Dalam implementasinya di Kecamatan Kie, untuk mengukur sumberdaya dalam implementasi kebijakan pencegahan stunting oleh Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Selatan di Kecamatan Kie ini dapat dilihat dari *Staff, Information, Authority, dan Facilities* (Edwards III, 1980:10-11). Namun dalam pengimplementasian kebijakan penataan ruang ini menurut hasil penelitian terlihat masih kurang baik secara kuantitas maupun kualitas SDM yang bertugas melakukan kegiatan pencegahan stunting di Kecamatan Kie, serta SDM keahlian SDM tentang stunting yang masih terbatas.

Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pencegahan stunting oleh Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Selatan di Kecamatan Kie tentunya bekerjasama dengan staf dinas terkait yang lainnya seperti Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten TTS, Camat Kie, para Kades, Petugas Kesehatan, Kapolsek Kie, Guru SD, SMP dan SMA. Pada dasarnya terkait sumber daya informasi ini, Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Selatan telah memiliki segenap informasi untuk menunjang implementasi kebijakan pencegahan stunting oleh Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Selatan di Kecamatan Kie ini. Disamping itu kewenangan yang dimiliki pun secara penuh dimiliki oleh Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Selatan

dalam mengimplementasikan kebijakan pencegahan stunting. Fasilitas dalam mengimplementasikan kebijakan ini pun pada dasarnya telah didukung bagi para pelaksana kebijakan dengan penyediaan sarana prasarana, baik itu gedung, maupun peralatan penunjang seperti kendaraan penyuluh kesehatan serta fasilitas kesehatan.

Dengan demikian implementasi kebijakan pencegahan stunting oleh Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Selatan di Kecamatan Kie dilihat dari sumber daya, pada dasarnya sumber daya untuk mengimplementasikan kebijakan ini telah tersedia dengan cukup, namun dari sisi SDM masih kekurangan SDM untuk melakukan penyuluhan serta pengendalian atas kasus stunting di Kecamatan Kie.

3. Disposisi

Jika suatu pelaksanaan kebijakan ingin efektif maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya sehingga dalam prakteknya tidak terjadi bias. Disposisi atau sikap pelaksana sangat diperlukan dalam implementasi kebijakan, walaupun komunikasi dan sumber daya guna menunjang implementasi kebijakan sudah baik, namun apabila pelaksana kebijakan memiliki sikap yang kurang baik, maka tentu saja implementasi kebijakan tidak akan efektif

Disposisi dapat diukur dari *Effects Of Disposition* (tingkat kepatuhan pelaksana) dan *Incentives* (insentif) (Edward III, 1980:11). Implementasi kebijakan pencegahan stunting oleh Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Selatan di Kecamatan Kie dapat dilihat dari kedua aspek tersebut. Tingkat kepatuhan pelaksana ini pada umumnya sudah memiliki karakteristik yang baik, namun masih ditemukan oknum penyuluh Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Selatan yang acuh tak acuh dalam melakukan penyuluhan.

Insentif terkait dengan penghargaan atau imbalan yang diberikan kepada para pelaksana kebijakan pencegahan stunting. Menurut hasil penelitian, insentif bagi para pelaksana kebijakan yaitu penyuluh Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga

Berencana Kabupaten Timor Tengah Selatan telah diberikan oleh Pemkot Kupang sesuai dengan aturan yang berlaku, serta sebaliknya adanya disinsentif yang merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana meminimalisir kasus stunting di Kecamatan Kie. Oleh karena itu, apabila terjadi tindakan yang melanggar ataupun tidak sesuai dengan rencana pencegahan stunting maka diberikan sanksi. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan saat ini mengalokasikan dana desa (ADD) sebesar 20 persen di tiap desa dalam rangka penanganan percepatan stunting atau anak kerdil tersebut.

Dengan demikian, implementasi kebijakan pencegahan stunting oleh Kabupaten Timor Tengah Selatan Di Kecamatan Kie dilihat dari faktor disposisi, pada umumnya aparaturnya pelaksana kebijakan yaitu penyuluh Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam melaksanakan kebijakan pencegahan stunting telah berupaya melaksanakan dan menegakkan kebijakan ini, namun masih ditemukan oknum yang acuh tak acuh dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sehingga turut berkontribusi terhadap tingginya kasus stunting di Kecamatan Kie.

4. Struktur Birokrasi

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut kerja sama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia maka hal ini akan menjadikan sumber daya tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Struktur Birokrasi merupakan sub variabel terakhir yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Struktur birokrasi akan memberikan gambaran tentang para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kewenangannya, serta pembagian kerja sehingga tidak terjadi *overlapping* pelaksanaan tugas dalam pengimplementasian kebijakan.

Guna mengukur struktur birokrasi ini, maka ada dua aspek yang digunakan yaitu *Standard Operating Procedures* (SOP), dan *Fragmentation* (Fragmentasi). (Edwards III, 1980:11-12). SOP ini berkaitan dengan cara kerja berikut didalamnya personil yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. SOP di satu sisi akan membantu dalam

pengimplementasian kebijakan jika SOP mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi, namun disisi lain akan terjadi sebaliknya jika tidak adaptif terhadap perubahan. implementasi kebijakan pencegahan stunting oleh Bkkbn Kabupaten Timor Tengah Selatan Di Kecamatan Kie dipimpin oleh Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan dan operasionalisasinya diserahkan kepada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Selatan yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

Dalam mengimplementasikan kebijakan pencegahan stunting, Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Selatan berpedoman kepada tugas dan fungsi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (1) BKKBN bertugas melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKKBN mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan nasional; b. penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria; c. pelaksanaan advokasi dan koordinasi; d. penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi; e. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi; dan f. pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi; di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Namun, masih ditemui kendala pada tahapan fragmentasi.

Fragmentasi dalam implementasi kebijakan pencegahan stunting oleh Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Selatan di Kecamatan Kie tentunya akan berdampak pada keberhasilan implementasi kebijakan ini. Bupati Timor Tengah Selatan mendelegasikan wewenangnya kepada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Selatan tentunya tidak sendiri mengimplementasikannya namun ada beberapa dinas yang terkait pula yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kupang, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Camat, Kepala Desa, Tokoh Adat hingga RT dan RW. Oleh karena itu koordinasi antar SKPD diperlukan. Namun berdasarkan hasil penelitian

terlihat masih kurang koordinasi antara SKPD yang terkait dalam hal koordinasi pencegahan stunting dimana masing-masing dinas mempertahankan ego sektoral masing-masing.

Dengan demikian implementasi kebijakan pencegahan stunting oleh Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Selatan di Kecamatan Kie ditinjau dari struktur birokrasi pada dasarnya sudah dibentuk struktur birokrasi yang cukup baik dengan adanya SKPD yang berwenang dalam mengimplementasikan kebijakan ini, namun disisi lain harus lebih ditingkatkan koordinasi antar SKPD dan lebih dipertegas lagi dengan regulasi untuk mengatur mekanisme pencegahan stunting dengan lebih spesifik.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan pencegahan stunting oleh Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Selatan di Kecamatan Kie masih ditemui beberapa permasalahan dalam implementasinya dilihat dari aspek komunikasi, Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Selatan pada prinsipnya telah mensosialisasikan kepada masyarakat terkait dampak stunting bagi anak namun masyarakat beranggapan bahwa stunting adalah karena faktor keturunan dan bukan karena kurang gizi. Sumber daya untuk mengimplementasikan kebijakan ini sudah cukup tersedia, namun masih kekurangan SDM secara kuantitas dan kualitas untuk melakukan penyuluhan pengawasan, pengendalian kasus stunting di Kecamatan Kie.

Sementara dari aspek disposisi, para pelaksana kebijakan memiliki karakteristik yang cukup baik untuk keberhasilan implementasi kebijakan pencegahan stunting ini ini, walaupun masih ditemui beberapa penyuluh yang acuh tak acuh dalam mengimplementasikan kebijakan. Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan ini pun memiliki dasar yang cukup kuat namun disisi lain masih harus dilakukan pembenahan dari sisi regulasi untuk lebih tegas lagi dalam menangani permasalahan

stunting serta menghilangkan ego sektoral antar SKPD yang bertanggung jawab dalam mencegah permasalahan stunting di Kecamatan Kie Kabupaten Timor Tengah Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Creswell, Jhon W. 2016. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Dunn, William N. 2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press.
- Nasir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan, 2018. <https://www.kemkes.go.id/resources/download/pusdatin/buletin/Buletin-Stunting-2018.pdf>
- Kemkes.go.id, 2020. [https://www.kemkes.go.id/resources/download/info-terkini/Rakerkesnas-2020/02Sideevent/SE_08/Studi%20Status%20Gizi%20Balita%20Terintegrasi%20SUSENAS%202019%20\(Kapus%20Litbang%20UKM\).pdf](https://www.kemkes.go.id/resources/download/info-terkini/Rakerkesnas-2020/02Sideevent/SE_08/Studi%20Status%20Gizi%20Balita%20Terintegrasi%20SUSENAS%202019%20(Kapus%20Litbang%20UKM).pdf)
- Buletin stunting.kemkes.go.id, 2018. <https://www.kemkes.go.id/resources/download/pusdatin/buletin/Buletin-Stunting-2020.pdf>